



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN -PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Upaya *Chiang Mai Initiative* (CMI) dalam Mengamankan
Likuiditas Korea Selatan Pada Krisis Finansial Global 2008**

Skripsi

Oleh

Ignatius Yonatan Samodra

2016330164

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN -PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Upaya *Chiang Mai Initiative* (CMI) dalam Mengamankan
Likuiditas Korea Selatan Pada Krisis Finansial Global 2008**

Skripsi

Oleh

Ignatius Yonatan Samodra

2016330164

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



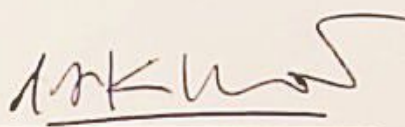
Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Ignatius Yonatan Samodra
Nomor Pokok : 2016330164
Judul : Upaya *Chiang Mai Initiative* (CMI) dalam Mengamankan
Likuiditas Korea Selatan Pada Krisis Finansial Global 2008

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 7 Januari 2020
Dan dinyatakan LULUS

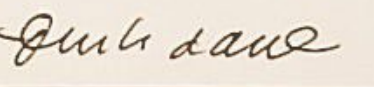
Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Dr. Aknolt Kristian Pakpahan

: 

Sekretaris

Sapta Dwikardana, Ph. D.

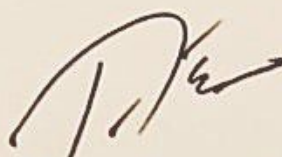
: 

Anggota

Dr. A. Irawan Justiniarto H.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ignatius Yonatan Samodra
NPM : 2016330164
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Upaya *Chiang Mai Initiative* (CMI) dalam
Mengamankan Likuiditas Korea Selatan Pada Krisis
Finansial Global 2008

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 9 Januari 2020

Penulis,

A yellow revenue stamp (Meterai Tempel) with the text "METERAI TEMPEL", "REKADAMFAKSI", "6000", and "RUPIAH". The stamp is partially obscured by a handwritten signature in black ink.

Ignatius Yonatan Samodra

Abstrak

Nama : Ignatius Yonatan Samodra
Nomor Pokok : 2016330164
Judul : Upaya *Chiang Mai Initiative* (CMI) dalam
Mengamankan Likuiditas Korea Selatan Pada Krisis
Finansial Global 2008

Pada tahun 2008, didapati bahwa Korea Selatan selaku salah satu negara anggota *ASEAN Plus Three* (APT) kembali mendapatkan dampak negatif yang cukup signifikan dari adanya serangan krisis finansial global terutama perihal kesulitan likuiditas. Pada periode ini, APT telah memiliki sebuah pengaturan likuiditas regional yang bernama *Chiang Mai Initiative* (CMI) guna mengamankan ketersediaan likuiditas negara anggota. Sebagai mekanisme pengaman keuangan regional, krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008 ini tentu dapat menjadi sebuah titik awal guna melihat **“bagaimanakah upaya CMI untuk membantu Korea Selatan dalam menangani kesulitan likuiditas pada krisis finansial 2008?”**. Dengan menggunakan paradigma neo-liberalisme, teori regional baru, dan konsep kerja sama finansial regional, penelitian ini akan melihat peran dan tantangan yang dihadapi oleh CMI sebagai manifestasi kerja sama finansial regional APT. Sebagai pelengkap, melalui konsep krisis finansial, penelitian ini juga akan melihat dampak negatif yang diterima oleh Korea Selatan terkait serangan keuangan yang terjadi pada tahun 2008 ini. Dengan demikian, penelitian ini dapat melihat peran CMI sebagai mekanisme keuangan regional dalam membantu krisis likuiditas yang dihadapi oleh Korea Selatan dengan lebih lengkap. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sebagai mekanisme pengaman keuangan regional, rupanya upaya yang dilakukan oleh CMI belum cukup untuk mendukung perannya sebagai mekanisme pengaman keuangan regional dalam mengamankan likuiditas Korea Selatan. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya, CMI masih memiliki beberapa hambatan operasional. Tiga diantaranya adalah ketidakcocokan kapasitas dengan kebutuhan, minimnya komitmen, dan minimnya distribusi yang adil.

Kata Kunci : *ASEAN Plus Three* (APT), *Chiang Mai initiative* (CMI), Krisis Likuiditas, dan Korea Selatan

Abstract

Nama : Ignatius Yonatan Samodra
Nomor Pokok : 2016330164
Judul : *Chiang Mai Initiative's (CMI) Efforts in Securing South Korean Liquidity in the 2008 Global Financial Crisis*

*In 2008, it was found that South Korea as one of the ASEAN Plus Three (APT) member countries again had a significant negative impact from the onset of the global financial crisis especially regarding liquidity problems. During this period, APT had a regional liquidity arrangement called the Chiang Mai Initiative (CMI) to secure the availability of member countries' liquidity. As a regional financial safeguard mechanism, the global financial crisis that occurred in 2008 could certainly be a starting point to see "**how are CMI's efforts to assist South Korea in dealing with liquidity difficulties in the 2008 financial crisis?**". Using the neo-liberalism paradigm, new regional theories, and the concept of regional financial cooperation, this research will look at the role and challenges faced by CMI as a manifestation of APT regional financial cooperation. As a complement, through the concept of the financial crisis, this research will also look at the negative impact received by South Korea related to the financial attacks that occurred in 2008. Thus, this research can see the role of CMI as a regional financial mechanism in helping the liquidity crisis faced by South Korea more fully. Based on the findings in this study, it can be concluded that as a regional financial security mechanism, apparently the efforts made by CMI were not enough to support its role as a regional financial security mechanism in securing South Korean liquidity. This is because in its implementation, CMI still has several operational obstacles. Three of them are capacity incompatibility with needs, lack of commitment, and lack of equitable distribution.*

Keywords : ASEAN Plus Three (APT), Chiang Mai initiative (CMI), Regional Financial Security Mechanisms, Liquidity Crisis, and South Korea

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas segala berkat-Nya dalam kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Dilatarbelakangi oleh meningkatnya tren kerja sama regional dalam bidang ekonomi di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara diakhir tahun 90-an, penelitian ini akan mengkaji upaya *Chiang Mai Initiative* sebagai keluaran utama dalam kerangka kerja sama *ASEAN Plus Three* untuk membantu Korea Selatan dalam menangani krisis likuiditas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan prespektif tambahan mengenai kajian kerja sama regional di kawasan Asia, serta dalam kajian ekonomi politik internasional. Tidak lupa, penulis juga berterimakasih kepada seluruh pihak meliputi kerabat, keluarga, dan dosen pembimbing yang mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi teknis maupun substantif. Oleh sebab itu, penulis akan sangat berterimakasih atas adanya kritik dan saran yang membangun sebagai masukan untuk melengkapi penelitian ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan yang ada.

Bandung, 6 Desember 2019

Ignatius Yonatan Samodra

Daftar Isi

Abstrak	i
<i>Abstract</i>	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	vi
Daftar Singkatan	vii
Bab I : Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	7
1.2.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8
1.4 Kerangka Pemikiran	9
1.4.1 Kajian Literatur	9
1.4.2 Kerangka Pemikiran	11
1.5 Metode Penelitian dan teknik Pengumpulan Data.....	20
1.5.1 Metode Penelitian	20
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.6 Sistematika Pembahasan	23
1.7 Kerangka Kerja.....	24
Bab II : Kerangka Kerja Sama Finansial Regional dalam ASEAN Plus Three (APT) dan Dampak Krisis Finansial Global 2008 bagi Korea Selatan	25
2.1 Kerja Sama Finansial regional ASEAN Plus Three (APT)	26
2.1.1 Pembentukan Kerangka Kerja Sama APT	26
2.1.2 Kerja Sama Finansial Regional APT : <i>Chiang Mai Initiative</i> (CMI)	32
2.1.3 Mekanisme dan Evolusi <i>Chiang Mai Initiative</i> (CMI).....	38
2.2 Dampak Krisis Finansial Global 2008 bagi Korea Selatan.....	42
2.2.1 Latar Belakang Krisis Finansial Global 2008	42
2.2.2 Dampak Krisis Finansial Global 2008 bagi Korea Selatan.....	44

Bab III : Peran Chiang Mai Initiative Menyelamatkan Korea Selatan dalam Menangani Krisis Likuiditas pada Krisis Finansial Global 2008	51
3.1 Kerja Sama Regional <i>ASEAN Plus Three</i> (APT) Sebagai Upaya Kolektif dalam Mencapai Kebutuhan Regional.....	52
3.2 Kerja Sama Finansial Regional <i>Chiang Mai Initiative</i> (CMI) Sebagai Pengaturan Likuiditas Regional	59
3.3 Upaya <i>Chiang Mai Initiative</i> (CMI) Menyelamatkan Korea Selatan dalam Menangani Krisis Likuiditas	62
3.3.1 Kecocokan Antara Kapasitas Pasokan Dengan Permintaan Negara Anggota	69
3.3.2 Komitmen Jangka Panjang yang Kuat untuk Mengembangkan Institusi	72
3.3.3 Terjaminnya Distribusi Keuangan yang Adil.....	76
 Bab IV : Kesimpulan	 79
 Daftar Pustaka	 84

Daftar Gambar

Gambar 2.1.....	48
-----------------	----

Daftar Singkatan

1. +3 : *plus three*
2. ADB : *Asian Development Bank*
3. AMF : *Asian Monetary Fund*
4. AMF : *Asian Monetary Fund*
5. AMRO : *ASEAN+3 Macroeconomic Research Office*
6. APEC : *Asia-Pacific Economic Cooperation*
7. APT : *ASEAN Plus Three*
8. ASA : *ASEAN Swap Arrangement*
9. ASEAN : *Association of Southeast Asian Nation*
10. ASEM : *Asia-Europe Meeting*
11. BIS : *Bank for International Settlements*
12. BSA : *Bilateral Swap Arrangement*
13. CMI : *Chiang Mai Initiative*
14. CMIM : *Chiang Mai Initiative Multilateralization*
15. EAEC : *East Asian Economic Caucus*
16. EAEG : *East Asian Economic Grouping*
17. EC : *European Commission*
18. ERPD : *Economic Review and Policy Dialogue*
19. IMF : *International Monetary Fund*
20. KTT : *Konferensi Tingkat Tinggi*
21. MERCOSUR : *Mercado Común del Sur*
22. NAFTA : *North American Free Trade Agreement*
23. OECD : *Organisation for Economic Co-operation and Development*
24. PDB : *Produk Domestik Bruto*
25. RLA : *Regional Liquidity Arrangement*
26. The Fed : *Federal Reserve*
27. ULN : *Utang Luar Negeri*
28. UN ECLAC : *United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean*
29. USD : *United States of America's Dollar*

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Kerjasama ekonomi kawasan antara negara-negara Asia Timur Laut dengan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN nampaknya telah mengalami kemajuan yang pesat khususnya pasca krisis finansial Asia. Dalam kasus ini, krisis ternyata tidak hanya menghancurkan nilai mata uang negara-negara yang terkena dampak krisis seperti Korea Selatan, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Namun ternyata, krisis ini juga mengakibatkan hancurnya keseluruhan kegiatan ekonomi, sosial, dan bahkan sistem politik negara-negara di kawasan ini. Secara umum, dipercayai bahwa faktor yang menyebabkan meledaknya krisis ini di Asia adalah paradigma yang salah terhadap kecukupan cadangan devisa dan lemahnya pengelolaan utang luar negeri (ULN) jangka pendek.¹

Krisis finansial Asia yang terjadi pada tahun 1997-1998 ini, bagaimanapun, akhirnya telah mendorong negara-negara di kawasan ini untuk mengadakan kerjasama ekonomi, khususnya dibidang keuangan yakni dengan membentuk sebuah mekanisme penanganan krisis keuangan yang lebih kuat. Hingga akhirnya, pada akhir tahun 1997, negara-negara Asia Timur yang terdiri dari Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan bersama

¹ Chalongphob Sussangkarn, "The Chiang Mai Initiative Multilateralization : Origin, Development, and Outlook," *Asian Development Bank Institute Working Paper Series 230* (2010) : 2.

dengan negara-negara anggota ASEAN akhirnya bersepakat untuk mendirikan sebuah forum untuk mengkoordinasikan kerja sama diantara mereka yang kemudian dilembagakan secara resmi pada tahun 1999 yang kita kenal sebagai *ASEAN Plus Three (APT)*.²

Korea Selatan sebagai salah satu negara anggota APT dapat dikatakan merupakan sebuah negara yang memiliki kerentanan cukup tinggi terhadap serangan krisis finansial. Kelemahan Struktural perekonomian ini diantaranya dibuktikan dengan adanya pengalaman Korea Selatan terkait dua krisis finansial yang membawa dampak buruk bagi perekonomiannya. Sebelum krisis finansial Asia terjadi, Korea Selatan merupakan salah satu negara yang dibanjiri oleh aliran modal asing menanggapi adanya "*Asian Miracle*".³ Pada krisis finansial Asia, Korea mempercayai bahwa faktor yang menggaris bawahi meledaknya krisis ini di Korea Selatan adalah faktor pinjaman luar negeri, yakni dimana mana banyak modal asing mengalir begitu cepat menanggapi *Asian Miracle* ini namun juga begitu cepat hilang meninggalkan Korea Selatan.⁴

Menanggapi kelemahan struktural ini, pemerintah akhirnya menerapkan berbagai langkah restrukturisasi di sektor finansial untuk mengembalikan kepercayaan investor asing. Salah satunya adalah dengan

² Hyoung-Kyu Chey, "The Political Economy of East Asian Financial Cooperation : The Chiang Mai Initiative," *Data Source of Economic Research Institute Bank of Korea* (2007) : 2.

³ Jong-Wha Lee, "Twenty Years After The Financial Crisis in The Republic of Korea," *Asian Development Bank Institute Working Paper Series 790* (2017) : 3.

⁴ Yongil Jeon, dan Stephen M. Miller, "The Effect of the Asian Financial Crisis on the Performance of Korean Nationwide Banks," *University of Connecticut Economic Workong Paper 2002-32* (2002) : 2.

membuat perjanjian dengan *International Monetary Fund* (IMF) pada 3 Desember 1997.⁵ Namun, didapati bahwa peran sentral IMF dalam upaya penyelamatan ini justru memperparah ekonomi Korea Selatan dikarenakan program bantuan dari IMF ini kemudian harus dilunasi dalam jangka waktu dekat.

Melalui krisis finansial Asia ini, disadari bahwa ketergantungan pada IMF guna mengatasi sebuah krisis, ternyata bukanlah pilihan yang baik bagi negara-negara di kawasan ini dan khususnya bagi Korea Selatan.⁶ Guna mengatasi permasalahan likuiditas, Korea Selatan beserta dengan beberapa negara dikawasan Asia Timur lainnya bersepakat untuk membangun mekanisme keuangan regional yang dapat mengurangi ketergantungan negara-negara di kawasan ini pada badan keuangan internasional (*regional self-help mechanism*)⁷ melalui forum kerja sama APT yang telah dibentuk sebelumnya. Prakarsa atau *initiative* ini dikenal juga dengan nama *Chiang Mai Initiative* (CMI) atau yang saat ini sudah bertransformasi menjadi *Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM) merupakan sebuah fasilitas pengaturan pertukaran keuangan bilateral (*bilateral swap*) yang dibentuk dengan tujuan utama untuk membantu negara-negara yang tergabung dalam inisiatif ini dalam mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek. Melalui pengaturan CMI ini, tentunya diharapkan dapat tercapainya dan stabilitas keuangan regional yang lebih kuat, khususnya dalam menghadapi krisis serupa.

⁵ Loc.Cit, Jong-Wha Lee.

⁶ Masahiro Kawai, "From the Chiang Mai Initiative to an Asian Monetary Fund," *Asian Development Bank Institute Working Paper Series 527* (2015) : 3.

⁷ Ibid, 3.

Pada tahun 2008, permasalahan finansial yang hebat kembali melanda perekonomian dunia, yakni dengan terjadinya krisis finansial dengan skala global. Krisis finansial yang terjadi pada tahun 2008 ini bagaimanapun kembali memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian Korea Selatan. Krisis ini berhasil menyebabkan terjadinya depresiasi mata uang won dengan tajam pada akhir 2008.⁸ Kejatuhan mata uang ini dipercepat pula pasca runtuhnya Lehman Brothers yakni merupakan salah satu bank investasi terkuat di Amerika⁹ yang kemudian memicu penarikan modal asing secara masif dari pasar keuangan Korea Selatan.¹⁰ Penarikan modal asing secara besar-besaran, serta terdapatnya lonjakan suku bunga di pasar domestik dan global pada akhirnya menyebabkan Korea Selatan kembali mengalami krisis likuiditas sebagaimana yang terjadi pada krisis finansial sebelumnya.

CMI pada periode ini telah berdiri dan beberapa kali mengalami peningkatan volume pertukaran bilateral hingga mencapai \$90 miliar dollar tepat di tahun 2008-2009.¹¹ Sebagai sebuah mekanisme pengaman keuangan regional, krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008 tentunya dapat menjadi sebuah titik awal untuk melihat peran CMI dalam membantu krisis likuiditas yang dialami oleh Korea Selatan. Melalui penjelasan diatas, penelitian ini kemudian akan difokuskan untuk

⁸ Hyekyung Cho, "South Korea's Experience With Global Financial Crisis," *The North-South Institute* (2012) : 6.

⁹ Hangyong Lee dan Changyong Rhee, "Lessons From the 1997 and the 2008 Crises in the Republic of Korea," *Asian Development Bank Economics Working Paper Series 298* (2012) : 3.

¹⁰ Loc.Cit, Hyekyung Cho, 6.

¹¹ Hyoung-Kyu Chey, "The Changing Political Dynamics of East Asian Financial Cooperation : The Chiang Mai Initiative," *Journal of Asian Survey University of California* 49, No.3 (2009) : 452.

mengkaji upaya Chiang Mai Initiative sebagai mekanisme keuangan regional untuk membantu Korea Selatan dalam mengatasi krisis likuiditas pada krisis finansial global 2008.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam perkembangan dunia hubungan internasional saat ini, regionalisme nampaknya memainkan peran yang semakin signifikan dalam mengembangkan hubungan sosial, ekonomi, dan politik antar negara di kawasan. Seperti diantaranya adalah berkembangnya kerja sama kawasan antara negara-negara Asia Timur Laut dan Asia Tenggara dalam forum kerja sama APT. Tren regionalisme di kawasan ini nampaknya turut berkembang begitu cepat, dibuktikan dengan banyaknya prakarsa (*initiative*) yang dibentuk seperti diantaranya adalah CMI.

Meskipun demikian hingga saat ini, regionalisme yang terjadi di kawasan ini rasanya masih belum membuahkan hasil yang optimal dikarenakan adanya dengan adanya beberapa hambatan seperti diantaranya adalah penerapan prinsip *ASEAN Way* dan fenomena bilateralisme. Adapun, meskipun pengelompokkan kerja sama ini melibatkan tiga negara diluar bendera ASEAN, namun dalam pelaksanaannya proses pembuatan keputusan dalam kerja sama APT mengadopsi mekanisme *ASEAN Way* yang didasarkan pada konsultasi dan konsensus untuk menjunjung tinggi kedaulatan setiap negara.¹² Namun,

¹² Vyacheslav V. Gavrilov, "Framework of the ASEAN Plus Three Mechanisms Operating in the Sphere of Economic Cooperation," *CALE Discussion Paper 7* (2011) : 7.

dalam tingkat tertentu penerapan prinsip ini dianggap dapat menghambat pengaplikasian hasil keputusan karena menyebabkan pengambilan keputusan menjadi lambat dan memiliki sifat yang tidak mengikat. Kedua, menurut studi yang dilakukan oleh Stuchlikova masih ditemukan bahwa negara-negara Asia ternyata masih lebih memilih perjanjian kerja sama antara dua negara dibandingkan dengan kerja sama yang dilakukan oleh tiga negara atau lebih (multilateralisme).¹³

Lebih lanjut lagi, keberadaan CMI sebagai fasilitas pengaturan keuangan regional juga kerap dipertanyakan akibat terdapatnya beberapa hambatan operasional. Sejak berdirinya CMI, dapat dikatakan bahwa mekanisme pengaman keuangan regional ini memiliki kelembagaan yang terbatas terutama diakibatkan oleh adanya persaingan antara dua kekuatan regional yakni Jepang dan Tiongkok yang diantaranya didorong oleh adanya kekhawatiran terhadap keamanan nasional dan rasa saling curiga yang berakar dalam sejarah.¹⁴ Menurut studi yang dilakukan oleh Park, kerja sama moneter dan keuangan APT yang muncul dengan kebutuhan regional untuk membentuk *regional self-help mechanism* dinilai memiliki banyak keteringgalan seperti diantaranya alokasi sumber daya keuangan yang belum cukup baik.¹⁵ Pada akhirnya, hambatan-hambatan operasional ini lah yang kemudian menjadi titik awal permasalahan akan signifikansi kerja sama finansial regional ini.

¹³ Zuzana Stuchlikova, "Changing Regionalism in South-East Asia : Some Theoretical and Practical Aspects," *Journal of Economic Pragensia* 16, No. 2 (2008).

¹⁴ Wolf Hassdorf, "Much Ado About Nothing? Chiang Mai Initiative Multilateralisation and East Asian Exchange Rate Cooperation," *Ritsumeikan Annual Review of International Studies* 10 (2011).

¹⁵ Young-Joon Park, "Strengthening ASEAN+3 Regional Financial Arrangements : A New Framework Beyond CMIM," *East Asian Economic Review* 21, No.1 (2017).

1.2.1 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan menaruh fokus pada analisis peran CMI sebagai sebuah mekanisme pengaturan pertukaran keuangan bilateral (*bilateral swap*) regional dalam mengatasi kesulitan likuiditas pada krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008 terhadap Korea Selatan. Oleh sebab itu pembatasan pertama adalah analisis yang terbatas pada Korea Selatan. Sebagai salah satu negara yang mendapatkan dampak negatif cukup signifikan dari adanya krisis finansial global pada tahun 2008, Korea Selatan merupakan negara yang dapat dengan sangat cepat bangkit secara ekonomi. Hal ini menjadi menarik karena di masa ini, negara-negara APT telah membentuk sebuah mekanisme keuangan regional sebagai fasilitas penanganan likuiditas dalam situasi darurat yakni *Chiang Mai Initiative* (CMI).

Sebagaimana permasalahan ini terjadi pada tahun 2008, maka dalam penelitian ini, analisa kerangka kerjasama CMI juga akan dibatasi dari tahun 2000 hingga 2010. Dimana pada pertengahan tahun 2000 CMI baru benar-benar beroperasi secara resmi, dan juga dikarenakan pada tahun 2010 CMI kemudian secara resmi telah ditransformasikan menjadi *Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM) yakni pengaturan pertukaran keuangan multilateral antar negara APT, sedangkan CMI adalah sebuah jaringan pengaturan pertukaran keuangan bilateral antara negara Asia Timur (+3) dengan negara ASEAN.

1.2.2 Perumusan Masalah

Bagaimanakah upaya *Chiang Mai Initiative* (CMI) sebagai sebuah mekanisme keuangan regional yang dibentuk oleh negara-negara *ASEAN Plus Three* (APT) untuk membantu Korea Selatan dalam menangani kesulitan likuiditas pada krisis finansial global tahun 2008?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara khusus ditujukan untuk mengetahui upaya *Chiang Mai Initiative* (CMI) sebagai sebuah mekanisme keuangan regional yang dibentuk oleh negara-negara *ASEAN Plus Three* (APT) untuk membantu Korea Selatan dalam menangani kesulitan likuiditas pada krisis finansial global tahun 2008.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi akademisi lain yang hendak melakukan pengkajian terhadap CMI sebagai mekanisme pengaman keuangan regional yang telah dibentuk pada tahun 2000 menanggapi pukulan kuat pada sektor keuangan yang dirasakan oleh negara-negara APT atas adanya krisis finansial Asia di tahun 1997-1998. Selanjutnya peneliti juga berharap penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai upaya CMI dalam memberikan

bantuan pengamanan terhadap serangan krisis likuiditas pada krisis finansial global 2008 khususnya bagi Korea Selatan.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kajian Literatur

Sebelum memasuki penjelasan yang lebih mendalam mengenai peran CMI sebagai bentuk kerjasama regional antara negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara dalam memantu Korea Selatan dalam menangani krisis finansial global tahun 2008, terdapat kebutuhan untuk melihat beberapa sumber kajian terdahulu untuk mebantu mendapatkan pemahaman-pemahaman mendasar mengenai isu yang diangkat dalam penelitian ini.

Melihat isu kerjasama regional yang terbentuk antara negara-negara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, Ravenhill dalam bukunya dengan judul "*APEC and the Construction of Pacific Rim Regionalism*" menjelaskan bahwa kerja sama regional rupanya dapat menekan berbagai macam biaya yang pada akhirnya membuat negara-negara dalam kawasan menjadi mitra kerjasama yang paling efisien dibandingkan dengan kerjasama dalam tingkat global.¹⁶ Lebih lanjut lagi, Jennifer Amyx dalam jurnalnya yang berjudul "*What Motivates Regional Financial Cooperation in East Asia Today?*" menjelaskan kerjasama finansial yang dilakukan oleh

¹⁶ John Ravenhill, *APEC and the Construction of Pacific Rim Regionalism* (New York : Cambridge University Press, 2001)

negara-negara dikawasan ini pada dasarnya didorong oleh dua faktor yakni faktor eksternal dan internal. Berdasarkan faktor eksternal, kekuatan kerjasama ini didorong oleh sentimen Asia Timur vs Barat (IMF), terkait program penyelamatan IMF pada krisis Asia tahun 1997 yang ternyata justru memperburuk keadaan negara-negara Asia Timur dan Asia tenggara yang mengikuti program bantuan ini. Berdasarkan faktor internal, kerjasama ini rupanya didorong oleh sikap Tiongkok yang lebih proaktif terhadap kerjasama regional. Krisis Asia jelas merupakan sebuah katalis bagi perkembangan regionalisme Asia.¹⁷

Di sisi lain, ditemukan pula bahwa keberadaan kerjasama regional di Asia Timur dan Tenggara ini ternyata tidak begitu memuaskan. Menurut Zuzana Stuchlikova dalam jurnalnya yang berjudul "*Changing Regionalism in South-East Asia : Some Theoretical and Practical Aspects*" benar bahwa, kerjasama ekonomi regional khususnya di negara-negara berkembang tentunya memiliki peran yang lebih besar untuk menunjang pembangunan nasional, meskipun regionalisme yang terjadi di Asia Timur dan Tenggara dapat dikatakan lebih terlambat dibandingkan dengan regionalisme di Eropa Barat. Tren regionalisme di kawasan ini berkembang begitu cepat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya prakarsa (*initiative*) yang dibentuk. Namun, dalam hal ini masih ditemukan bahwa negara-negara Asia ternyata masih lebih memilih perjanjian

¹⁷ Jennifer Amyx, "What Motivates Regional Financial Cooperation in East Asia Today?," *Journal of Asia Pacific Issues*, No. 76 (2005)

kerjasama antara dua negara (fenomena ini disebut juga “bilateralisme”) dibandingkan dengan multilateralisme.¹⁸

Salah satu bentuk prakarsa atau *initiative* yang dibentuk dalam kerjasama antara negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara (APT) ini diantaranya adalah Chiang Mai Initiative (CMI) yang merupakan kerjasama finansial antara negara-negara APT sebagai mekanisme pengaman keuangan regional yang ditujukan untuk mengamankan stabilitas keuangan regional dari adanya krisis finansial. Hyoung-Kyu Chey dalam jurnalnya yang berjudul “*The Changing Political Dynamics of East Asian Financial Cooperation : The Chiang Mai Initiative*” menjelaskan bahwa hingga tahun 2008, dibandingkan dengan proposal *Asian Monetary Fund* (AMF), CMI telah mengalami beberapa perkembangan yang signifikan. Adapun perkembangan tersebut diantaranya didasari oleh tiga faktor kunci yakni Jepang menjadi lebih aktif dalam mengajukan inisiatif regional; keterbukaan Tiongkok terhadap kerjasama keuangan regional; dan, berkurangnya oposisi Amerika Serikat terhadap kerjasama keuangan Asia Timur.¹⁹

1.4.2 Kerangka Pemikiran

Dinamika dunia hubungan internasional yang penuh dengan ketidakpastian menyebabkan setiap negara pada akhirnya harus

¹⁸ Loc. Cit, Zuzana Stuchlikova.

¹⁹ Loc. Cit, Hyoung-Kyu Chey.

selalu siap dengan segala macam ancaman yang mungkin terjadi. Seperti diantaranya adalah krisis finansial yang mengancam stabilitas ekonomi politik suatu negara. Secara umum, krisis dapat diartikan sebagai sebuah gagasan mengenai dimensi bencana yang luar biasa negatif dan tidak terduga pada situasi tertentu.²⁰ Berdasarkan asal katanya, dalam bahasa Yunani, “*krísi*” berarti keputusan, yang merupakan istilah medis untuk mendefinisikan momen spesifik ketika terdapat tindakan mendesak yang dibutuhkan memerangi penyakit.²¹

Dalam konteks ini, menurut Taylor dan Weerapana dalam prinsip ekonomi mikro, krisis finansial merupakan sebuah gangguan terhadap pasar keuangan yang membuat orang-orang mengalami kesulitan untuk meminjam dan mendapatkan pinjaman, dan kemudian hal ini dapat berdampak pada terjadinya resesi ekonomi di sebuah negara.²² Dalam pandangan IMF, krisis semacam ini dipahami sebagai sebuah situasi di mana terdapatnya serangan terhadap mata uang yang mengarah pada depresiasi mata uang secara tajam dan penguapan terhadap cadangan internasional.²³ *Bank for International Settlements* (BIS) juga menilai setidaknya terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sebuah

²⁰ Romain Laufer, *International Handbook of Organizational Crisis Management*. Edited by Christine M. Pearson, Christophe Roux-Dufort, and Judith A. Clair (Thousand Oaks : SAGE Publication Inc, 2007), 2.

²¹ Loc. Cit, Romain Laufer.

²² John B. Taylor, dan Akila Weerapana, *Principle of microeconomics : global financial crisis edition* (United States of America : Cengage Learning, 2010), 3.

²³ Graciela Kaminsky dkk, “Leading Indicators of Currency Crises,” *IMF Working paper 97/79* (1997) : 15.

krisis diantaranya adalah adanya terdapatnya kemunduran di hampir seluruh variabel ekonomi tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai cerminan sektor riil ekonomi sebuah negara; kondisi sektor eksternal meliputi nilai tukar riil, cadangan devisa, daya saing ekspor; dan sektor keuangan meliputi rasio modal dan tingkat likuiditas.²⁴

Kemudian, untuk memahami dampak yang diterima oleh Korea Selatan terkait adanya krisis finansial ini, maka akan dijelaskan pemahaman mengenai dampak. Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dampak merupakan suatu efek baik yang bersifat jangka panjang maupun pendek, positif atau negatif, primer ataupun sekunder yang dihasilkan oleh adanya intervensi.²⁵ Selain itu, *European Commission* (EC) juga menyampaikan bahwa istilah dampak menggambarkan seluruh perubahan yang terjadi karena adanya intervensi yang diberikan.²⁶

Merujuk pada topik penelitian ini, maka dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan neo-liberalisme dalam studi ilmu hubungan internasional, teori regional baru (*new regional theory*) dan konsep kerja sama finansial regional dalam studi regionalisme. Adapun, untuk memahami peran CMI dirasa terdapat pula kebutuhan untuk mendefinisikan “peran”. Peran dalam ilmu

²⁴ Blaise Gadanecz, dan Kaushik Jayaram, “Measures of Financial Stability,” *IFC Bulletin* 31 (2008) : 366-370.

²⁵ Simon Hearn, dan Anne L. Buffardi, “What is Impact?,” *Methods Lab Working Paper* (2016).

²⁶ Ibid.

sosiologi menurut Diana Kendall dapat merupakan suatu harapan atas perilaku yang terkait dengan sebuah status.²⁷ Jonathan Turner juga mendefinisikan peran sebagai sebuah aktivitas yang dikenali sebagai tanda garis perilaku.²⁸

Neo-liberalisme dalam studi ilmu hubungan internasional merupakan sebuah pendekatan yang berakar dari liberalisme klasik. Fokus utama dalam neo-liberal adalah bagaimana mencapai kerjasama diantara negara-negara dan aktor-aktor lain dalam sistem internasional. Bagi neo-liberalisme sistem internasional yang anarki dapat diatasi melalui keberadaan sebuah institusi. Melalui institusi, negara dapat mengidentifikasi kepentingan bersama yang ingin dicapai. Sehingga hal ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas dalam sistem internasional yang anarki. Menurut Keohane, institusi merupakan seperangkat aturan yang persisten dan terhubung baik secara formal maupun informal, menentukan perilaku, membatasi aktivitas, dan membentuk harapan.²⁹

Selain dalam tingkat internasional, kerjasama juga dapat terjadi pada tingkat regional yang juga mengarah pada perkembangan regionalisme. Pemahaman secara luas mengenai regionalisme menurut Andrew Heywood merupakan suatu teori atau praktik mengenai proses dimana terdapatnya negara-negara dalam

²⁷ Diana Kendall, *Sociology in Our Times : The Essentials* (USA : Cengage Learning, 2012)

²⁸ Jonathan H. Turner, *Theoretical Sociology : A Concise Introduction to Twelve Sociological Theories* (United States of America : SAGE Publications, 2014)

²⁹ Viotti, dan Kauppi, *International Relations Theory*. 5th Edition (Pearson Education Inc, 2012) : 147.

sebuah wilayah geografis yang bergabung menjadi sebuah unit ekonomi maupun politik yang signifikan untuk mengkoordinasikan kegiatan politik, ekonomi, maupun sosial.³⁰ berdasarkan asal katanya istilah wilayah (*region*) berasal dari bahasa Latin "*regio*", yang menunjukkan sebuah distrik atau arah, dan "*regere*" yang berarti untuk memerintah, mengelola, dan menertibkan.³¹

Menurut Heywood, regionalisme dapat terjadi pada dua tingkat yang berbeda yakni tingkat kelembagaan dan tingkat afektif. Pada tingkat kelembagaan, proses regionalisme dapat melibatkan tumbuhnya norma, aturan, dan struktur formal yang pada akhirnya memungkinkan koordinasi kegiatan antar negara dapat dilakukan. Pada tingkat afektif, proses regionalisme juga menyiratkan terjadinya penyesuaian identitas politik suatu negara terhadap suatu wilayah.³² Regionalisme dapat dimanifestasikan kedalam berbagai jenis diantaranya adalah regionalisme ekonomi; regionalisme keamanan; dan regionalisme politik. Merujuk pada topik penelitian ini, maka bahasan berikutnya akan difokuskan pada penjelasan regionalisme ekonomi di sektor finansial.

Regionalisme ekonomi secara umum dapat dipahami sebagai pengaturan atau preferensi dalam urusan ekonomi antara sekelompok negara yang berada pada wilayah geografis yang

³⁰ Andrew Heywood, *Global Politics* (United Kingdom : Palgrave Foundation, 2011) : 481-482.

³¹ Karolina Klecha-Tylec, *The Theoretical and Practical Dimensions of Regionalism in East Asia* (Poland : Palgrave Macmillan, 2017) : 8.

³² Op. Cit, Andrew Heywood, 482.

sama.³³ Menurut Heywood, istilah regionalisme ekonomi mengacu pada penciptaan peluang ekonomi yang lebih besar melalui kerjasama antar negara-negara yang berada di dalam wilayah geografis yang sama.³⁴ Regionalisme ekonomi dapat digolongkan sebagai regionalisme baru.

Teori regional baru (*new regional theory*) memiliki fokus bahasan pada bidang ekonomi dengan menekankan pentingnya institusi dalam meningkatkan stabilitas regional, mengurangi ketidakpastian ekonomi, mengurangi biaya transaksional, hingga akhirnya meningkatkan proses integrasi regional.³⁵ Menurut Kevin G. Cai, regionalisme baru dapat dibagi menjadi dua bentuk yakni regionalisme yang sangat tertutup (*hard-closed regionalism*) yang merujuk pada bentuk regionalisme yang sangat terlembagakan dan diskriminatif, dan terbentuk dari hasil kesepakatan politik antar pemerintah dan regionalisme yang terbuka (*soft-open regionalism*) yang merujuk pada proses integrasi regional yang terjadi akibat adanya dorongan dari kekuatan pasar, tidak dilembagakan, dan tidak bersifat diskriminatif.³⁶ Selanjutnya untuk melihat apakah regionalisme itu bersifat tertutup atau terbuka, dapat dilihat melalui tingkat pelembagaan, diskriminasi, dan keterbukaan terhadap

³³ Keving G. Cai, *The Politics of Economic Regionalism : Explaining Regional Economic Integration in East Asia* (Great Britain : Palgrave Macmillan, 2010) : 8.

³⁴ Op. Cit, Andrew Heywood, 483.

³⁵ Op. Cit, Karolina Klecha-Tylec, 21.

³⁶ Op. Cit, Keving G. Cai, 28-29.

negara-negara di luar kawasan. Adapun, setidaknya terdapat tiga tingkat pelebagaan regional yakni :³⁷

1. Regionalisme dengan pelebagaan tinggi, yakni terdapatnya lembaga-lembaga regional resmi dibentuk untuk mengatur urusan politik, ekonomi, dan sosial.
2. Regionalisme semi pelebagaan, yakni dimana organisasi regional dibentuk hanya untuk sarana berkonsultasi atau mengkoordinasikan kegiatan politik, ekonomi, ataupun sosial, tetapi bukan untuk memerintah. Sehingga sifat kebijakan atau keputusan yang dibuat dalam organisasi ini bersifat sugestif.
3. Regionalisme non-pelebagaan, yakni bentuk regionalisme yang tidak memiliki organisasi regional resmi. Regionalisme ini umumnya terjadi di bidang ekonomi yang mana sebagian besar didorong oleh pasar.

Berbicara mengenai regionalisme, analisis terhadap regionalisme umumnya akan diasosiasikan dengan konsep integrasi kawasan. Namun, teori regionalisme baru berpandangan bahwa integrasi regional secara fundamental adalah hal yang berbeda dengan kerja sama regional.³⁸ Perbedaan antara kedua ide tersebut pada dasarnya terletak pada tingkat konsolidasi regionalnya. Integrasi regional, didasarkan pada komitmen negara-negara dalam kawasan yang kuat, komprehensif, dan mengikat dalam proses

³⁷ Op. Cit, Keving G. Cai, 28-29.

³⁸ Fredrik Soderbaum, *Introduction : Theories of New Regionalism* (London : Palgrave Macmillan, 2003), 14.

menemukan solusi bagi masalah-masalah bersama yang mereka hadapi.³⁹ Sedangkan kerja sama regional hanyalah merujuk pada kerja sama antar negara dalam kawasan untuk mencapai tujuan bersama.⁴⁰

Dalam sektor yang lebih spesifik regionalisme ekonomi juga dapat terjadi di dalam sektor finansial dan moneter yang mana tujuan utamanya adalah untuk menciptakannya stabilitas keuangan dan moneter di suatu wilayah tertentu, diantaranya adalah melalui pengaturan keuangan terkait pembiayaan likuiditas pada saat terjadinya krisis neraca pembayaran.⁴¹ Soderbaum juga menyatakan bahwa kerja sama finansial merupakan kerjasama yang berkaitan dengan mekanisme yang digunakan oleh negara-negara untuk memberikan dukungan keuangan satu sama lain ketika terjadi krisis finansial. Kerjasama ini pun, hanya dapat menjadi efektif apabila dibangun diatas dasar yang kuat dari dialog kebijakan dan pengawasan.⁴² Namun, meskipun aspek finansial merupakan hal yang penting dalam proses regionalisme ekonomi, amat disayangkan bahwa studi mengenai regionalisme ekonomi umumnya hanya berfokus pada aspek perdagangan saja, dan kurang menekankan pada aspek finansialnya.

³⁹ Op. Cit, Karolina Klecha-Tylec, 15.

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Jose Antonio Ocampo, *Regional Financial Cooperation* (Washington, D.C : Brookings Institution Press, 2006), 34-35.

⁴² Loc. Cit, Fredrik Soderbaum.

Berdasarkan konsep kerja sama finansial regional yang dikembangkan oleh *United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean* (ECLAC) kerangka kerja sama semacam ini diharapkan dapat membawa dua dampak positif yakni terciptanya stabilitas yang lebih kuat pada ekonomi regional dengan tersedianya layanan esensial yang tidak dapat disediakan oleh lembaga internasional, terutama dalam menghadapi proses dinamis dunia hubungan internasional yang semakin terbuka; dan akan menjadi sistem yang lebih seimbang dibandingkan dengan sistem yang didasarkan pada organisasi internasional.⁴³ Adapun terdapat dua bentuk kerjasama finansial regional yakni :⁴⁴

1. Pembiayaan pembangunan seperti diantaranya dengan memperkuat pasar obligasi regional
2. Mekanisme kerjasama ekonomi makro dan finansial terkait pembiayaan likuiditas selama terdapatnya krisis neraca pembayaran

Namun, disaat yang bersamaan kerangka kerjasama ini juga memiliki tiga tantangan besar yakni :⁴⁵

1. Kecocokan antara kapasitas pasokan dengan permintaan negara anggota;
2. Komitmen jangka panjang yang kuat untuk mengembangkan institusi; dan

⁴³ Op. Cit, Jose Antonio Ocampo, 34.

⁴⁴ Ibid, 3-4.

⁴⁵ Ibid, 34.

3. Terjaminnya distribusi keuangan yang adil.

1.5 Metode Penelitian dan teknik Pengumpulan Data

1.5.1 Metode Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran CMI dalam menyelamatkan Korea Selatan dari krisis finansial maka dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun, berdasarkan tujuannya, maka penelitian ini juga dapat dikategorikan kedalam penelitian studi kasus (*case study research*). Dikutip dari W. Lawrence Neuman, penelitian studi kasus merupakan sebuah pengkajian mendalam terhadap sejumlah informasi mengenai sebuah kasus pada suatu periode atau lintas periode tertentu.⁴⁶ Menurut Lisa Harison dan Theresa Callan, model penelitian studi kasus juga dapat diberikan untuk menjelaskan pandangan terperinci terhadap sebuah subjek yang sering kali fokusnya dibatasi pada tempat, dan waktu tertentu.⁴⁷

Pada dasarnya, penelitian kualitatif adalah penelitian atau riset yang bersifat deskriptif dan analisis. Pandangan mendasar mengenai mengenai penelitian Kualitatif menurut Harrison dan Callan adalah sebagai pendekatan interpretatif dan alami yang mana berusaha

⁴⁶ W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*. 7th Edition (United States of America : Pearson Education Limited, 2014), 42.

⁴⁷ Lisa Harrison dan Theresa Callan, "Case Studies," *Key Research Concepts in Politics and International Relations* (55 City Road : SAGE Publication Inc, 2013), 2.

menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti “mengapa” dan “bagaimana”.⁴⁸

Menurut Alan Bryman, penelitian kualitatif merupakan sebuah strategi penelitian yang biasanya lebih menekankan kata-kata atau kalimat dibandingkan dengan kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisis datanya.⁴⁹ Terdapat sekiranya tiga ciri dari penelitian kualitatif yakni:⁵⁰

1. adanya pandangan induktif antara teori dengan penelitian;
2. adanya pemahaman dunia sosial melalui pemeriksaan interpretasi oleh para pesertanya;
3. adanya pemahaman bahwa sifat sosial adalah hasil dari interaksi antara individu.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, penulis akan menggunakan studi literatur atau dapat disebut juga analisis dokumen. Hal ini disebabkan oleh dokumen atau catatan yang ada kerap memberikan pengetahuan mengenai suatu peristiwa, waktu, dan atau kelompok tertentu yang tidak dapat diamati menggunakan cara lain.⁵¹ Dalam penelitian kualitatif, Harrison dan Callan

⁴⁸ Lisa Harrison dan Theresa Callan, “Qualitative Methods,” *Key Research Concepts in Politics and International Relations* (55 City Road : SAGE Publication Inc, 2013), 2.

⁴⁹ Alan Bryman, *Social Research Methods. 4th Edition* (Great Clarendon Street, UK : Oxford University Press, 2012), 380.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Lisa Harrison dan Theresa Callan, “Documentary Analysis,” *Key Research Concepts in Politics and International Relations* (55 City Road : SAGE Publication Inc, 2013), 2.

menjelaskan bahwa studi dokumen dapat dikelompokkan kedalam dua kategori dasar yakni dokumen publik, yakni merupakan dokumen yang biasanya dikumpulkan melalui proyek penelitian seperti diantaranya adalah dokumen resmi; dan dokumen pribadi, yakni merupakan dokumentasi pribadi terhadap sebuah topik yang sedang dieksplorasi seperti diantaranya adalah buku harian, dan memo.⁵²

Dalam mengumpulkan data, penulis akan menggunakan literatur yang berasal baik dari dokumen berbentuk buku maupun jurnal yang ditulis oleh para ahli dalam kajian yang terkait dengan kerangka kerjasama finansial regional, manajemen krisis finansial global, dan sebagainya. Kemudian, penulis juga akan menggunakan artikel dan koran untuk mendukung kekayaan sumber berita dan informasi terkini yang berkaitan dengan topik penelitian.

Setelah data dikumpulkan kemudian akan dilakukan analisis data. Menurut Neuman, analisis data merupakan mengatur data secara sistematis, mengintegrasikan, dan memeriksa data guna menemukan pola dan hubungan yang spesifik.⁵³ Dalam penelitian ini, data yang berupa dokumen kemudian akan dianalisis menggunakan metoda analisis triangulasi. Triangulasi data pada dasarnya merupakan sebuah metoda dalam melihat suatu hal dari berbagai macam sudut pandang.⁵⁴ Dalam konteks ini, maka

⁵² Loc.Cit, Lisa Harrison dan Theresa Callan, "Documentary Analysis,".

⁵³ Op. Cit, W. Lawrence Neuman, 477.

⁵⁴ Ibid, 171.

dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan kemudian akan dilihat dari berbagai sudut pandang, untuk akhirnya dapat menemukan pola yang spesifik.

1.6 Sistematika Pembahasan

Pada Bab 1, penulis akan memberikan pendahuluan penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan.

Pada Bab 2, akan diberikan pembahasan mengenai kerangka kerja sama finansial regional dalam pengelompokan APT; selain itu akan dibahas juga dampak krisis finansial global bagi Korea Selatan.

Pada Bab 3, akan dibahas upaya CMI menyelamatkan Korea Selatan dalam menangani krisis likuiditas akibat serangan keuangan pada krisis finansial global.

Akhirnya, pada Bab 4, penulis akan menyimpulkan temuan-temuan yang telah dibahas pada Bab II dan Bab III dan menjawab rumusan permasalahan yang telah disampaikan pada Bab I.

